



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PEKALONGAN

2024

# LKjIP

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
2025



[dlh.pekalongankota.go.id](http://dlh.pekalongankota.go.id)



[dlh.kotapekalongan](https://www.instagram.com/dlh.kotapekalongan)



[DLHKotaPKI](https://www.facebook.com/DLHKotaPKI)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetap dikembangkan Pemerintah Kota Pekalongan adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*.

Menurut Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penelusuran Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan publik tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kepada publik atas kinerja pada Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini diharapkan adanya umpan balik perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pekalongan, 14 Februari 2025  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PEKALONGAN



Drs. SRI BUDI SANTOSO, M.Si  
Pembina, Utama Muda  
NIP. 19701214 199003 1 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024, memiliki 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja dan 5 (lima) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 5 (lima) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 86,05

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP DLH adalah 85,45 dengan katagori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 99,30%.

2. Indikator tertib hukum lingkungan, target yang ditetapkan 43, realisasi 43,51, persentase capaiannya 101,18%.
3. Indikator persentase Tingkat pencemaran air, target yang ditetapkan 42,86, realisasi 54,29, persentase capaiannya 78,95%
4. Indikator persentase kenaikan luasan RTH, target yang ditetapkan 0,24, realisasi 0,11, persentase capaiannya 45,48%.
5. Indikator persentase peningkatan pengelolaan sampah, target yang ditetapkan 70,68. Realisasi 92,55, persentase capaiannya 130,94%

Kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 31.220.548.963,- atau 95,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp 32.591.270.000,-

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup.....	2
1. Deskripsi Perangkat Daerah.....	2
2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	2
3. Struktur Organisasi .....	3
1.3. Kondisi Aparatur Dinas Lingkungan Hidup .....	4
1.4. Isu Strategis.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026 .....	9
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 .....	14
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>18</b>
3.1. PENGUKURAN KINERJA.....	19
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	22
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	38
3.4. PRESTASI YANG DIRAIH .....	42
<b>BAB IV P E N U T U P.....</b>	<b>44</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia DLH Kota Pekalongan .....	5
Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1. 3 Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan .....	6
Tabel 2. 1 Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2024 .....	10
Tabel 2. 2 Target Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup .....	15
Tabel 2. 3 Target Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup .....	16
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 .....	17
Tabel 3. 1 Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	21
Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 .....	22
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	23
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2026 .....	23
Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2024.....	24
Tabel 3. 6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 .....	25
Tabel 3. 7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024... ..	25
Tabel 3. 8 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 .....	26
Tabel 3. 9 Program dan Kegiatan serta anggaran 2024.....	27
Tabel 3. 10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 .....	28
Tabel 3. 11 Program dan kegiatan serta anggaran 2024 .....	29
Tabel 3. 12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 .....	32
Tabel 3. 13 Perbandingan Indeks Kualitas Air dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 .....	32
Tabel 3. 14 Program dan kegiatan serta anggaran 2024 .....	33
Tabel 3. 15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 .....	35
Tabel 3. 16 Perbandingan Indeks Kualitas Lahan dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 .....	35
Tabel 3. 17 Program dan kegiatan serta anggaran 2024 .....	36
Tabel 3. 18 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 .....	37
Tabel 3. 19 Program dan kegiatan serta anggaran 2024 .....	37
Tabel 3. 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 .....	38

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	4
Gambar 1. 3 Prosentase SDM DLH .....	5
Gambar 1. 4 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada DLH Kota Pekalongan .....	7



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi dan otonomi daerah, menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Masyarakat menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Berdasarkan peraturan di atas Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam



perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## 1.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

### 1. Deskripsi Perangkat Daerah

Pemerintah bertugas untuk Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara daya dukung lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar berfungsi secara optimal yang mengarah pada keseimbangan dinamis antara aspek teknis, sosial dan lingkungan yang kesemuanya diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat generasi sekarang maupun yang akan datang. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pencegahan dan pemulihan akibat kegiatan/usaha yang berpotensi pencemaran.

### 2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran program urusan Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;



- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **3. Struktur Organisasi**

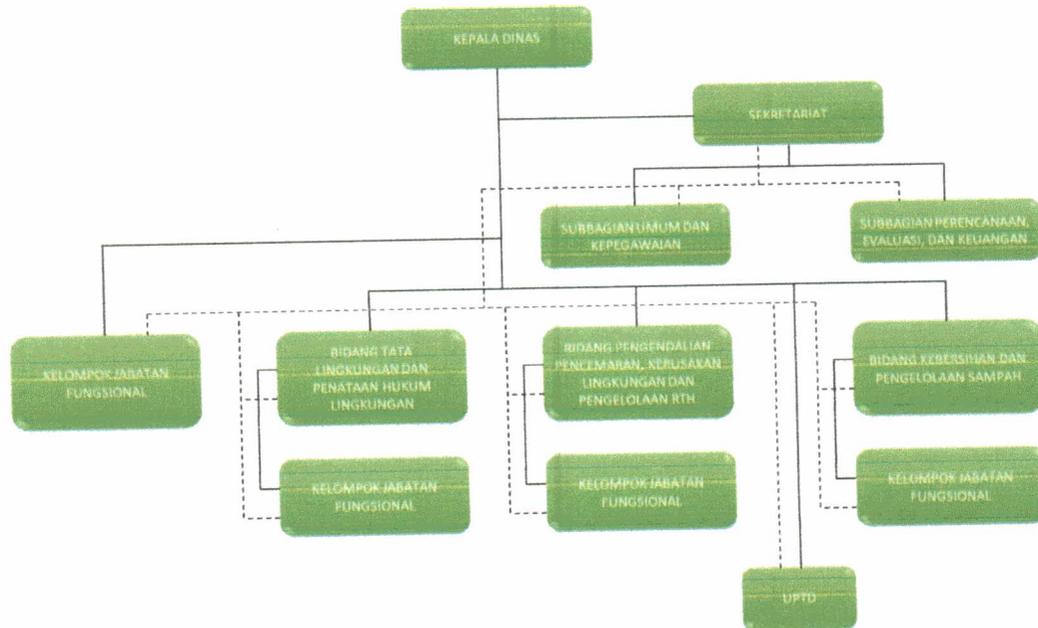
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, terdiri dari:
  - Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH terdiri dari:
  - Jabatan Fungsional
5. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, terdiri dari:
  - Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan alir struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**



### 1.3. Kondisi Aparatur Dinas Lingkungan Hidup

DLH Kota Pekalongan dalam melaksanakan operasional pekerjaan berkantor di Jalan Tentara Pelajar Nomor 1 Pekalongan. DLH Kota Pekalongan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dengan 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 3 (tiga) Kepala Bidang dengan 7 (Tujuh) Jabatan Fungsional Hasil Penyederhanaan Birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan pada Tahun 2024 didukung oleh 517 (lima ratus tujuh belas) orang personil yang terdiri dari:

- 98 (sembilan puluh delapan) orang PNS;
- 136 (seratus tiga puluh enam) orang Tenaga Kontrak;
- 283 (dua ratus delapan puluh tiga) orang Tenaga Kegiatan.

#### 1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

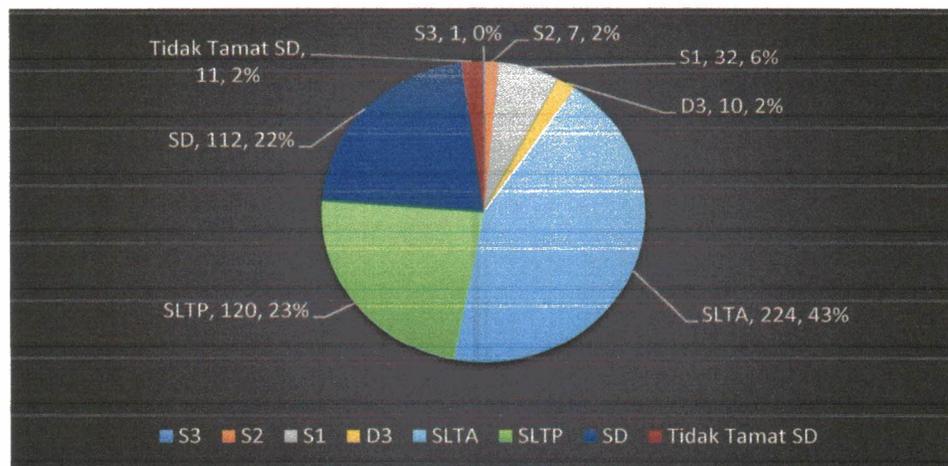
Sumber daya manusia DLH Kota Pekalongan berdasarkan tingkat Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia DLH Kota Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Keterangan	Tingkat Pendidikan								Total
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Tdk Tamat SD	
I	PNS									
1	Eselon II	1	-		-	-	-	-		1
2	Eselon III		2	2	-	-	-	-		4
3	Eselon IV		1		-	-	-	-		1
4	Koordinator JF		3	3	1	-	-	-		7
5	Staf		-	9	3	38	21	14		85
	Jumlah PNS	1	6	14	4	38	21	14		98
II	Tenaga Kontrak		-	-	-	60	37	39		136
III	Tenaga Kegiatan		1	18	6	126	62	59	11	283
	Jumlah	1	7	32	10	224	120	112	11	517

**Gambar 1. 2 Prosentase SDM DLH Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural adalah sebanyak 6(enam) orang dan 92 (Sembilan puluh dua) fungsional tertentu dan umum, dengan perincian sebagai berikut:

1. Struktural 6 ( enam ) orang, terdiri dari:
  - a. Eselon II.b : 1 (satu) orang
  - b. Eselon III.a : 1 (satu) orang
  - c. Eselon III.b : 3 (tiga) orang
  - d. Eselon IV.a : 1 (satu) orang



2. Fungsional Tertentu dan Umum : 98 (sembilan puluh delapan) orang
2. **Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin**

Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	81	17	98
2	Tenaga Kontrak	108	28	136
3	Tenaga Kegiatan	255	28	283
Jumlah		444	73	517

3. **Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan**

Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

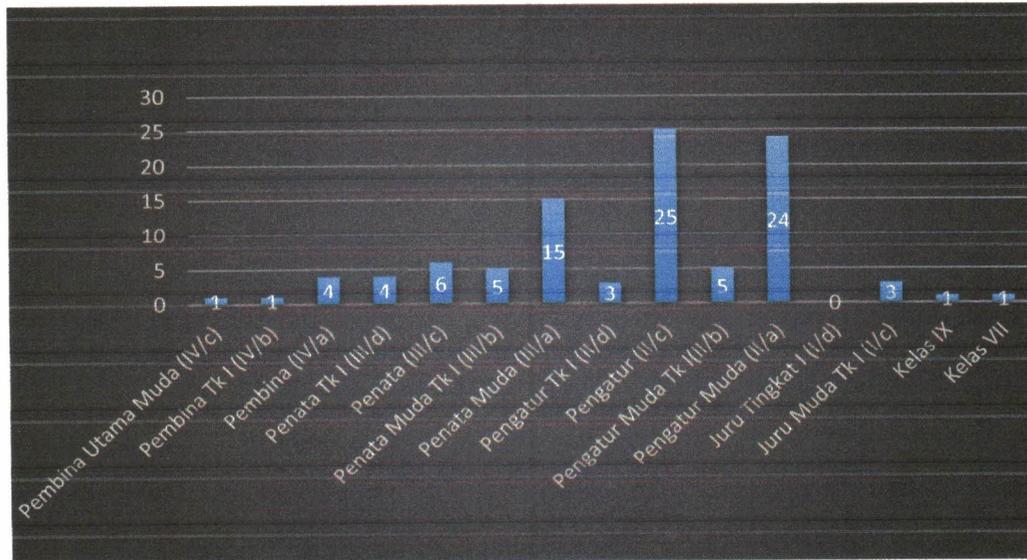
**Tabel 1. 3 Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan**

No	Keterangan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	4
4	Penata Tk I (III/d)	4
5	Penata (III/c)	6
6	Penata Muda Tk I (III/b)	5
7	Penata Muda (III/a)	15
8	Pengatur Tk I (II/d)	3
9	Pengatur (II/c)	25
10	Pengatur Muda Tk I (II/b)	5
11	Pengatur Muda (II/a)	24
12	Juru Tingkat I (I/d)	-
13	Juru Muda Tk I (I/c)	3
14	Kelas IX	1
15	Kelas VII	1
Jumlah		98



Sedangkan PNS berdasarkan Pangkat/Golongan pada DLH dapat dilihat pada grafik berikut :

**Gambar 1. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada DLH Kota Pekalongan**



Kondisi SDM yang ada sekarang ini dirasa masih kurang dan rendah kompetensinya, hal ini mengingat kondisi wilayah Kota Pekalongan sebagai wilayah pesisir dengan hasil perikanan yang besar, kota industri dan jasa yang mempunyai banyak permasalahan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan penambahan SDM tenaga lapangan serta SDM yang berlatar belakang pendidikan lingkungan, maupun lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Laboratorium Lingkungan lengkap dengan peralatannya, sampai saat ini laboratorium tersebut sudah dapat beroperasi namun belum didukung tenaga analis laboratorium yang memadai yang saat ini hanya 5 (lima) orang tenaga kegiatan. Sementara berkaitan dengan laboratorium yang akan segera melakukan proses akreditasi sangat memerlukan dukungan tenaga yang kompeten dan memadai dalam operasional laboratorium.

#### 1.4. Isu Strategis

Kemampuan daya dukung kota dan daya dukung lingkungan alamiah semakin berkurang untuk meregenerasi berbagai permasalahan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks akibat aktivitas



pembangunan yang menimbulkan pencemaran. Kota Pekalongan dengan letak geografis berbatasan langsung dengan laut, maka tidak bisa mengesampingkan isu lingkungan di wilayah pesisir. Terdapat juga isu pencemaran sungai-sungai yang melintas di Kota Pekalongan dan kurangnya ruang terbuka hijau serta tingginya timbulan sampah. Selain itu isu tentang pemanasan global merupakan fenomena seluruh negara yang krusial, karena kalau tidak segera ditangani akan menuju pada kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Isu strategis tentang lingkungan hidup menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Masing-masing aspek tidak dapat dipisah-pisahkan karena akan saling mempengaruhi satu sama lain. Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang berwenang dengan penekanan pada tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga. Dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif.

Isu strategis yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Pengendalian pencemaran air;
2. Pengendalian pencemaran udara;
3. Pengelolaan persampahan;
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap pemanasan global (*Global Warming*);
5. Terbatasnya RTH dan perubahan penggunaan lahan;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan;
7. Adaptasi dan mitigasi rob;
8. Konservasi sumber daya air (SDA); dan
9. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta



didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Tabel 2. 1 Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2024

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-4 : Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip Pembangunan kota yang berkelanjutan		
Tujuan Kota 4.2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup 4.2.1 : Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup 4.2.1 : Menurunnya Tingkat Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air (IKK Output)	59,37 indeks



Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup 4.2.1 : Meningkatnya Usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	42,86 persen
Program DLH 4.2.1.1 : Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase limbah yang diolah	45,02 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 4.2.1.1.1 : Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	51,09 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 4.2.1.1.2 : Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76,47 persen
Program DLH 4.2.1.2 : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33, persen
Kegiatan DLH 4.2.1.2.1 : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	6 usaha/kegiatan
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup 4.2.2 : Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	
Tujuan DLH 4.2.2 : Meningkatkan kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKK Output)	37,64 indeks
Sasaran DLH 4.2.2 : Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Kenaikan Luasan RTH	0,24 persen
Program DLH 4.2.2.1 : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,93 persen
Kegiatan 4.2.2.1.1 : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik	109,61 Ha
Tujuan 4.3 : Menjamin layanan infrastruktur dasar	Persentase capaian infrastruktur dasar	
Sasaran 4.3.2 : Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	70,68 persen
Tujuan DLH : Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	71,12 persen
Sasaran DLH : Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	
Program #02.11.11 : Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,29 persen
Kegiatan #01.11.11 : Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	17,69 persen
Misi ke-7 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government		



Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
Tujuan Kota 7.1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indek Reformasi Birokrasi	
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup 7.1.2 : Meningkatkan kualitas layanan publik (Smart Governance)	IKM Kota	
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup 7.2.1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,23 indeks
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup 7.2.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	86,05 indeks
Program DLH 7.2.1.1 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</li><li>- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</li><li>- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 100 persen</li><li>- 100 persen</li><li>- 100 persen</li></ul>
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 7.2.1.1.1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 7.2.1.1.2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 7.2.1.1.3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 7.2.1.1.4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 7.2.1.1.5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 7.2.1.1.6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 persen



Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
	Urusan Pemerintahan Daerah1	
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup 7.2.1 : Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup	Tertib hukum lingkungan	
Program DLH #02.11.02 : Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	0 persen
Kegiatan DLH #02.11.02 : Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	0 dokumen
Program #02.11.06 : Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen
Kegiatan #02.11.06.1 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan	100 persen
Program #02.11.08 : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50 persen
Kegiatan #02.11.08.1 : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	100 persen
Program #02.11.09 : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75 persen
Kegiatan #02.11.09.1 : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	3 penghargaan
Program #02.11.10 : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen
Kegiatan #02.11.10 : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6 kasus



## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada Tabel 2.2.



Tabel 2. 2 Target Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	(Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai / 35(7 parameter air pada 5 sungai)	DLH Kota Pekalongan
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	Persen	(Luas RTH Th N - Luas RTH Th N-1) / Luas RTH Th N-1	DLH Kota Pekalongan
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	(Jumlah sampah terkelola tahun N - Jumlah sampah terkelola tahun N-1) / Jumlah sampah terkelola tahun N - 1 * 100%	DLH Kota Pekalongan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Nilai SAKIP Tahun N (Sumber Inspektorat)	Inspektorat Kota Pekalongan
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	Persen	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL / Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL/UPL	DLH Kota Pekalongan

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3



Tabel 2. 3 Target Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	65,71	62,86	62,86	42,86	42,86	42,86
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	Persen	0,346	0,345	0,344	0,343	0,341	0,340
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	71,90	71,48	71,07	70,68	70,29	69,91
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85	86	87	86,05	86,30	86,55
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	Persen	16,5	25,3	34,42	43,00	51,9	60,1

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.



Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	2024	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	42,86
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (TRH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	0,24
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	70,68
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	86,05
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	43,00

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 15.700.271.000,-	APBD
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.363.066.000,-	APBD
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 4.248.163.000,-	APBD
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 2.271.000,-	APBD
Program Pembinaan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Rp 39.713.000,-	APBD
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 254.393.000,-	APBD
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 60.750.000,-	APBD
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 13.875.000,-	APBD
Program Pengelolaan Persampahan	Rp 10.908.768.000,-	APBD



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Lingkungan Hidup selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.



### 3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

➤ Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ Arahan Operasional

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ Akuntabilitas

Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.



➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3. 1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82,5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57,5
Sangat Tidak Berhasil	:	25



Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

## 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	42,86	54,29	78,95	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	0,24	0,11	45,48	Sangat Tidak Berhasil
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	70,68	92,55	130,94	Sangat berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	86,05	85,45	99,30	Sangat berhasil
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	43,00	43,51	101,18	Sangat berhasil



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 3 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 91,17% dengan kategori berhasil.

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	45	62,86	51,43	54,29	▲
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	n/a	0,388	1,31	0,11	▼
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	73,75	92,72	95,20	92,55	▼
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,89	85,75	86,05	85,45	▼
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	20	25,81	43,04	43,51	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	persen	54,29	60	78,95	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase kenaikan luasan RTH	persen	0,11	0,340	45,48	Sangat Tidak Berhasil
3	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	persen	92,55	69,91	130,94	Sangat berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,45	90	99,30	Sangat berhasil



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
5	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	persen	29,62	60,1	101,18	Sangat berhasil

### 3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,23	96,24	103,23	Sangat berhasil
2	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air (IKK Output)	Indeks	59,37	50,56	85,16	Berhasil
3	Meningkatkan Kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKK Output)	Persen	37,64	26,14	69,45	Tidak Berhasil
4	Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persen	71,12	71,85	101,03	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 3) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 4) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 89,72% dengan kategori "berhasil".

### 3.2.3. Analisis Capaian Kinerja



### SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	84,12	Indeks	85,75	86,05	86,05	85,45	99,30	86,55

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperoleh nilai 85,45 atau predikat “Sangat Memuaskan”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Lingkungan Hidup sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,6
2	Pengukuran Kinerja	30	26,4
3	Pelaporan Kinerja	15	12,45
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	22
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>85,45</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A (Memuaskan)</b>	



Tabel 3. 8 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI TAHUN 2024
	PROVINSI JAWA TENGAH	82,63
	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	73,02
1	BAPPEDA	88,50
2	DINKOMINFO	83,40
3	DLH	85,45
4	DINDAGKOP-UKM	85,75
5	INSPEKTORAT DAERAH	84,60
6	DPUPR	81,25
7	BPKAD	84,50
8	DISDUKCAPIL	82,60
9	DPMPPA	82,75
10	DKP	83,25
11	BKPSDM	83,20
12	DINKES	83,20
13	SETDA	81,50
14	DINPARBUDPORA	77,55
15	DPMPTSP	77,90
16	DINDIK	78,00
17	DINHUB	77,15
18	DINPERPA	76,10
19	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	77,00
20	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	76,25
21	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	76,15
22	DINARPUS	75,45
23	BPBD	75,45
24	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	74,30
25	DINPERINAKER	75,45
26	DINSOS P2KB	75,90
27	DINPERKIM	74,75
28	SATPOL P3KP	74,25
29	SEKRETARIAT DPRD	75,15
30	BADAN KESBANGPOL	73,45

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :



- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3. 9 Program dan Kegiatan serta anggaran 2024

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.960.000	15.960.000	15.954.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.329.603.000.000	10.275.130.000	9.505.862.975
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.880.000	23.417.000	23.116.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.105.000	394.205.000	392.398.189
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	566.589.000	566.589.000	560.472.390
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.415.884.000	4.424.970.000	4.393.476.250
	JUMLAH		14.672.021.000	15.700.271.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94,85%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100,93%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,41%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Target untuk indikator ini adalah 100 persen dan realisasi 100,93%, sehingga capaiannya 100,93%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah,



efektif dan efisien. Progam ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100, realisasi 100, sehingga capaiannya 100%.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 2, realisasi 2, sehingga capaiannya 100%.
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100, realisasi 100, sehingga capainnya 100%.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100, realisasi 108,27, sehingga capaiannya 108,27%.
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target 100, realisasi 100, sehingga capaiannya 100%.
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target 100, realisasi 100, sehingga capaiannya 100%.

## SASARAN 2 : Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Tertib hukum lingkungan	25,81	Persen	25,81	43,04	43,00	43,51	101,18	60,1

Hasil evaluasi Tertib hukum lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperoleh nilai 101,18 atau predikat "Memuaskan". Penilaian tersebut menunjukkan Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL/Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL/UPL atau  $UKL/UPL \times 100\%$  di Dinas Lingkungan Hidup sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator Persentase Tertib Hukum Lingkungan merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**



**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan Tertib Hukum Lingkungan;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang terkait;
- c. Adanya dukungan SDM yang memadai.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3. 11 Program dan kegiatan serta anggaran 2024

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN(R EFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	40.500.000	37.713.000	39.665.700
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah Kab/Kota	268.393.000	254.393.000	245.422.500
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	63.750.000	60.750.000	60.750.000
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kab/Kota	14.625.000	13.875.000	12.807.700
<b>JUMLAH</b>		<b>387.268.000</b>	<b>366.731.000</b>	<b>358.645.900</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97,79%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 101,18%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,47%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung 4(empat) program sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Target untuk indikator ini adalah 16,67% dan realisasi 7,67% sehingga capaiannya 45,99%. Indikator ini tidak dapat terealisasi karena jumlah persetujuan teknis dan PPLH yang diterbitkan 13. Jumlah



kegiatan/usaha yang diawasi selama 5 tahun yang tidak berizin 600, perlu ada penyesuaian Kembali atas penetapan target tahunan (akumulasi atau target capaian per tahun). Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan dengan target 100 realisasi 100 sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah terlaksananya 10 kegiatan terdiri dari Perhotelan, industri tekstil, industri es, industri kelistrikan, fasilitas pelayanan kesehatan, SPBU, Dealer mobil, Perbankan, dan modern market.

- 2) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 50% dan realisasi 100%, sehingga capaiannya 200%. Indikator ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada Masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
  - a) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan dengan target 100%, realisasi 100%, sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena terlaksananya 2 event yang dihadiri oleh 5 komunitas peduli lingkungan.
- 3) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 75%, realisasi 100% sehingga capaiannya



133,33%. Indikator program ini dapat terealisasi karena ada 2 kegiatan pemberian penghargaan yang telah dilaksanakan yaitu Proper Tingkat kota dan Penilaian sekolah adiwiyata Tingkat kota. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat dengan target 3 dan terealisasi 3 dengan tingkat capaian 100 %. Capaian sesuai dengan target karena ada penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi (CSAP) yaitu MTs Azzaky Pekalongan, SMP N 3 Pekalongan, SD Kandang Panjang 2, penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri (CSAM) yaitu SMAN 1 Pekalongan, dan penghargaan Proper untuk perusahaan.
- 4) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Target untuk indikator ini adalah 100%, terealisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena semua pengaduan lingkungan hidup dari Masyarakat terselesaikan dan ditindaklanjuti. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1(satu) kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah kasus lingkungan yang ditangani dengan target 6 dan terealisasi 5 dengan tingkat capaian 83,33 %. Capaian kurang dari target karena pada tahun 2024, terdapat 5 kasus lingkungan yang masuk dan sudah ditangani serta sudah diselesaikan.

### **SASARAN 3 : Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya**

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :



Tabel 3. 12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Tingkat pencemaran air	62,86	Persen	62,86	51,43	42,86	54,29	78,95	42,86

Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Air atau IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Air Kota Pekalongan sebesar 35,37, lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMD dan capaian tahun sebelumnya. Pemantauan kualitas air sungai di Kota Pekalongan dilakukan terhadap 3 sungai yaitu Sungai Pekalongan, Sungai Meduri dan Sungai Banger pada masing-masing bagian hulu, tengah dan hilir sungai. Pemantauan kualitas air dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun dengan ketentuan mewakili musim kemarau (asumsi debit air sungai rendah) dan mewakili musim hujan (asumsi debit air sungai tinggi).

Berikut data rincian hasil Perbandingan Indeks Kualitas Air dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Perbandingan Indeks Kualitas Air dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Daerah	Nilai Indeks Kualitas Air
1.	Provinsi Jawa Tengah	52,01
2.	Kabupaten Batang	58,68
3.	Kabupaten Pekalongan	46,36
4.	Kabupaten Pemasang	48,33
5.	Kabupaten Tegal	49,41
6.	Kota Pekalongan	50,56
7.	Kota Tegal	50,00

Sumber data : Ekspose IKLH Provinsi Jawa Tengah, 2025



**Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :**

1. Sosialisasi pengelolaan limbah terhadap usaha dan kegiatan di Kota Pekalongan;
2. Kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan kegiatan di kota Pekalongan yang menghasilkan limbah;
3. Pengawasan hasil uji laboratorium untuk hasil olahan Ipal usaha/ kegiatan dan rekomendasi untuk ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup.
4. Adanya IPAL batik secara komunal di 3 lokasi, yaitu Kelurahan Kauman, Kelurahan Jenggot dan Kelurahan Banyurip;
5. Adanya layanan sedot limbah industri bagi usaha dan kegiatan yang belum memiliki IPAL.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3. 14 Program dan kegiatan serta anggaran 2024

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/Kota	883.342.000	906.527.000	890.975.090
	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	833.539.000	456.539.000	448.856.404
Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara limbah B3	2.271.000	2.271.000	2.271.000
<b>JUMLAH</b>		1.719.152.000	1.365.337.000	1.342.102.494

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,29%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 78,95%. maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 2 (dua) program sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Target untuk indikator ini adalah 45,02% dan realisasi 108,23%



sehingga capaiannya 240,40%. Indikator program ini dapat terealisasi karena jumlah limbah yang dapat diolah masih tetap sesuai dengan kemampuan IPAL eksiting. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1(satu) kegiatan sebagai berikut :

- a) Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya dengan target 51,09 dan terealisasi 31,90 dengan tingkat capaian 62,45%. Capaian kurang dari target karena jumlah pelaku yg menghasilkan limbah 1492 dan yang mengolah limbanya 476 dan nilai ini tidak berubah kalau tidak ada penambahan Ipal, dan tidak beroperasinya IPAL Pringrejo.
  - b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase upaya penanggulangan pencemaran air dengan target 76,47 dan terealisasi 60 dengan tingkat capaian 78,46 %. Capaian kurang dari target karena 5 Rencana penanggulangan terhadap isu prioritas lingkungan hidup (tata guna lahan, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan, tata kelola) : - penyusunan DIKPLHD - penyusunan D3TLH - penghitungan IKLH - penyusunan DE revit IPAL Jenggot (Tidak Terlaksana) - penyusunan DE revit IPAL Kauman (Tidak Terlaksana).
- 2) Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Target untuk indikator ini adalah 13,33% dan realisasi 13,33% sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat dicapai karena jumlah usaha kegiatan penghasil limbah B3 45 perusahaan. Target usaha kegiatan yang memenuhi persyaratan limbah B3 dalam 1 tahun 6 perusahaan. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1(satu) kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyimpanan Sementara Limbah B3. dengan indikator Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3 dengan target 6 dan terealisasi 6 dengan tingkat capaian 100 %. Capaian sesuai



target karena terdapat 6 usaha/kegiatan yang memenuhi tempat penyimpanan Limbah B3 yaitu PT. Urip Sugiarto, RSUD Bendan, Puskesmas Jenggot, RS Hermina dan RS Siti Khodijah dan Puskesmas Bendan

#### SASARAN 4 : Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Kenaikan Luasan RTH	0,388	Persen	0,388	0,31	0,24	0,11	45,48	0,340

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan seperti semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, Ruang Terbuka Hijau dan area rehabilitasi hutan dan lahan. Indeks kualitas tutupan lahan sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau. Pada tahun 2024, indeks kualitas lahan sebesar 26,14, melebihi target RPJMD yang telah ditentukan dan capaian tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan Indeks Kualitas Lahan Kota Pekalongan dengan daerah sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 16 Perbandingan Indeks Kualitas Lahan dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Daerah	Nilai Indeks Kualitas Lahan
1.	Provinsi Jawa Tengah	49,26
2.	Kabupaten Batang	44,58
3.	Kabupaten Pekalongan	60,47
4.	Kabupaten Pemalang	50,39
5.	Kabupaten Tegal	40,42
6.	Kota Pekalongan	26,14
7.	Kota Tegal	36,02

Sumber data : Ekspose IKLH Provinsi Jawa Tengah, 2025

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

1. Penambahan luasan ruang terbuka hijau dengan pembangunan taman,



rehabilitasi taman dan penanaman pohon di Kota Pekalongan;

2. Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dan persampahan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3. 17 Program dan kegiatan serta anggaran 2024

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	4.680.999.999	4.248.163.000	4.199.432.276
<b>JUMLAH</b>		4.680.999.999	4.248.163.000	4.199.432.276

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,85%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100,42%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,59%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1(satu) program sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Target indikator ini 2,93%, realisasi 2,94% sehingga capaiannya 100,42%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya penambahan RTH Publik baru seluas 0,12 Ha dari pengalihan lahan eks bengko di Kelurahan Klego (Seruni Grand Park). Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1(satu) kegiatan sebagai berikut :
  - a) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Luas RTH Publik dengan target 109,61 dan terealisasi 110,06 dengan tingkat capaian 100,41%. Capaian melebihi target karena terdapat penambahan luasan RTH dari pemanfaatan lahan bengkok di Klego seluas 1.200m<sup>3</sup> atau 0,12 ha, sehingga luas RTH Publik 110,06 ha.



### SASARAN 5 : Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 18 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase pengelolaan sampah	92,72	Persen	92,72	95,20	70,68	92,55	130,94	69,91

Indikator Persentase tingkat pelayanan sampah merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Persentase tingkat pelayanan sampah merupakan cakupan dari rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kota Pekalongan. Pada tahun 2024, jumlah seluruh rumah tangga di Kota Pekalongan sebanyak 80.269 rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga yang terlayani sampahnya sebanyak 57.675 rumah tangga.

Sehingga persentase pelayanan sampah dapat dihitung sebagai berikut =  $(57.675 / 80.269) = 71,85 \%$  rumah tangga yang terlayani.

Capaian diatas melebihi target RPJMD dan capaian tahun-tahun sebelumnya. tahun 2022 sebesar 72,36% rumah tangga yang terlayani sampah, tahun 2023 sebesar 73,09% rumah tangga yang terlayani sampah.

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

1. Revitalisasi TPS 3R di Kota Pekalongan;
  2. Penambahan sarpras pengelolaan kebersihan dan persampahan.
  3. Efektivitas dan kedisiplinan SDM terutama tenaga kebersihan di lapangan.
- Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3. 19 Program dan kegiatan serta anggaran 2024

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	10.673.668.000	10.908.768.000	10.437.338.489
<b>JUMLAH</b>		10.673.668.000	10.908.768.000	10.437.338.489



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,68%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 105,01%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,75%. Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Persampahan. Target untuk indikator ini adalah Persentase pengelolaan sampah dengan target 0,29 dan terealisasi 0,30 dengan tingkat capaian 105.01 %. Capaian melebihi target karena Jumlah sampah terkelola Tahun 2024 (55.313.590 kg) lebih besar dari Jumlah sampah terkelola Tahun 2023 (55.145.659 kg).

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 32.591.270.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 31.220.548.963,- atau sebesar 95,79%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 22.429.228.000,- dengan realisasi sebesar Rp.21.825.360.812,- atau sebesar 97,31%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	15.960.000	15.954.000	99,96



	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	15.960.000	15.954.000	99,96
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.320.000	2.320.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.640.000	1.640.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.994.000	99,95
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	10.275.130.000	9.505.862.975	92,51
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.162.042.000	9.395.188.151	92,45
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	111.568.000	109.154.824	97,84
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	23.417.000	23.116.000	98,71
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.417.000	23.116.000	98,71
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	394.205.000	392.398.189	99,54
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.275.000	4.275.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.820.000	74.871.750	98,75
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	750.000	743.000	99,07
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.700.000	130.970.250	99,45
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.000.000	31.918.500	99,75
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.560.000	2.520.000	98,44
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.100.000	147.099.689	100,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	566.589.000	560.472.390	98,92
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	1.970.000	82,08
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.960.000	262.585.110	97,99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296.229.000	295.917.280	99,89
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4.424.970.000	4.393.476.250	99,29



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173.151.000	163.483.115	94,42
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	4.114.799.000	4.097.818.719	99,59
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.020.000	107.174.616	95,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	24.999.800	100
2	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	0	0	0
	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota</b>	0	0	0
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	0	0	0
3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN dan /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	1.363.066.000	1.339.831.494	98,30
	<b>Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	906.527.000	890.975.090	98,28
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	572.126.000	569.921.900	99,61
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	35.110.000	35.107.000	99,99
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	299.291.000	285.946.190	95,54
	<b>Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	456.539.000	448.856.404	98,32
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	104.368.000	101.368.966	97,13
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	352.171.000	347.487.438	98,67
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	4.248.163.000	4.199.432.276	98,85
	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	4.248.163.000	4.199.432.276	98,85



	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.339.783.000	3.293.251.056	98,61
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	908.380.000	906.181.220	99,76
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)</b>	2.271.000	2.271.000	100,00
	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	2.271.000	2.271.000	100,00
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.271.000	2.271.000	100,00
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	39.713.000	39.665.700	99,88
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	39.713.000	39.665.700	99,88
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	14.250.000	14.240.000	99,93
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.463.000	25.425.700	99,85
7	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	254.393.000	245.422.500	96,47
	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	254.393.000	245.422.500	96,47
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	58.000.000	57.847.500	99,74
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	52.500.000	51.940.000	98,93



	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	143.893.000	135.635.000	94,26
8	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	60.750.000	52.500.000	86,42
	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	60.750.000	52.500.000	86,42
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	60.750.000	52.500.000	86,42
9	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	13.875.000	12.807.700	92,31
	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	13.875.000	12.807.700	92,31
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	12.000.000	10.962.800	91,36
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kab/kota	1.875.000	1.844.900	98,39
10	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	10.908.768.000	10.437.338.489	95,68
	<b>Pengelolaan Sampah</b>	10.908.768.000	10.437.338.489	95,68
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.896.107.000	7.482.593.108	94,76
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	752.445.000	739.023.186	98,03
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2.260.216.000	2.215.722.195	98,03
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.591.270.000</b>	<b>31.220.548.963</b>	<b>95,79</b>

### 3.4. PRESTASI YANG DIRAIH

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan



potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut:

### 1. Prestasi Tingkat Kota Pekalongan

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Peringkat 1	Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	2024
2	Peringkat 3	Pengelolaan Pengaduan Publik	2024

### 2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	SMP Negeri 3 Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2024
2	SDN Kandang Panjang 2 Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2024
3	MTs Azzaky Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2024

### 3. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	SMA Negeri 1 Kota Pekalongan	Sekolah Adiwiyata mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2024	2024



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,30% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,18% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 78,95% atau interpretasi cukup baik.
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 45,48% atau interpretasi cukup baik.
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai atau interpretasi 130,94% atau interpretasi sangat baik.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 32.591.270.000,00 (Tiga puluh dua miliar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota



Pekalongan adalah 95,79% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan perlu lebih dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan. Langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu lebih cermat dan teliti dalam merencanakan kegiatan agar target sesuai dengan realisasinya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 17 Februari 2025  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PEKALONGAN



Drs. SRI BUDI SANTOSO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701214 199003 1 004



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN  
Tahun 2024



# LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	85,00	85,00	86,00	87,00	86,05	86,30	86,55	Inspektorat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
2	Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup	Tertib hukum lingkungan hidup	Persen	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL / Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL/UPL	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	16,5	16,5	25,3	34,42	43	51,9	60,1		
3	Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai dibagi 35 (parameter air pada sungai) dikali 100 %	Data Terakhir/ Semakin Rendah Semakin Baik / 100	65,71	65,71	62,86	62,86	42,86	42,86	42,86	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH
4	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kenaikan luasan RTH	Persen	Luas RTH Tahun N dikurangi Luas RTH Tahun N-1 dibagi Luas RTH Tahun N-1 dikali 100 %	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	0,346	0,346	0,345	0,344	0,343	0,341	0,340	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH
5	Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	Jumlah sampah terkelola Tahun N dikurangi Jumlah sampah yang terkelola tahun N-1 dibagi Jumlah sampah yang terkelola Tahun N-1 dikali 100 %	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	71,90	71,90	71,48	71,07	70,68	70,29	69,91	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Pekalongan



**Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si.**

NIP. 19701214 199003 1 004



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Lingkungan Hidup**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pekalongan, 9 Desember 2024**



**H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.**

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

**Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si**  
**NIP. 197101214 199003 1 004**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

**Unit Kerja: Dinas Lingkungan Hidup**

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,23	Formulasi : Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air (IKK Output)	35,37	Formulasi : Release dari Kementerian LH Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kementerian LH
3.	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	23,60	Formulasi : Release data dari DLHK Provinsi Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DLHK Provinsi
4.	Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Persentase Pelayanan Sampah	71,12	Formulasi : (Rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah / Jumlah seluruh rumah tangga) Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DLH

Sasaran :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	86,05	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	43,00	Formulasi : Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL/Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL/UPL x 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan
3.	Meningkatnya Usaha Yang Terolah Limbahnya	Presentase tingkat pencemaran air	42,86	Formulasi : Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai/35(7 parameter air pada 5 sungai) x 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH
4.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Presentase kenaikan luasan RTH	0,343	Formulasi : $(\text{Luas RTH Th N} - \text{Luas RTH Th N-1}) / \text{Luas RTH Th N-1} \times 100\%$ Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH

5.	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	70,68	<p>Formulasi : <math>(\text{Jumlah sampah terkelola tahun N} - \text{Jumlah sampah terkelola tahun N-1}) / \text{Jumlah sampah terkelola tahun N-1} * 100</math></p> <p>Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik</p> <p>Sumber data : Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah</p>
----	--	---	-------	--

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.700.271.000	APBD-P
2. Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 0	APBD-P
3. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 39.713.000	APBD-P
4. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 254.393.000	APBD-P
5. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 60.750.000	APBD-P
6. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 13.875.000	APBD-P
7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.363.066.000	APBD-P

8. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Rp.	2.271.000	APBD-P
9. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	4.248.163.000	APBD-P
10. Pengelolaan Sampah	Rp.	<u>10.908.768.000</u>	APBD-P
<b>JUMLAH</b>	Rp	<b>32.591.270.000</b>	

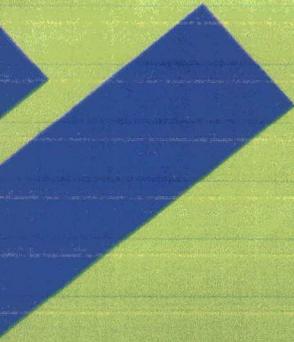
Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si  
NIP. 197101214 199003 1 004



Pekalongan  
World's City of Batik

A stylized batik motif in a dark brown color, featuring a circular shape with two leaves extending from the top right, integrated into the word 'Pekalongan'.